
DEMOGRAFI POLITIK KEWARGAAN DAERAH PINGGIRAN KOTA PANGKALPINANG

*Rendy*¹
*Dini Wulansari*²
*Berlian Zarina*³

Abstrak

Kota Pangkalpinang terus bertransformasi menjadi sebuah kota kecil yang modern, dan tentunya menghadapi berbagai dinamika persoalan dan tantangan kewargaan yang semakin kompleks. Kompleksitas kewargaan perkotaannya tentu memiliki konteks kerumitan yang begitu beragam, sesuai dengan demografi politik kewargaan kawasan pinggiran perkotaan. Kajian ini mengkomparasikan lanskap sosial politik dan dinamika tantangan yang dihadapi masyarakat di tiga lokasi penelitian, yang tercermin pada struktur politik kewargaan sehari-hari. Pendekatan yang digunakan yaitu studi kualitatif dengan teknik pengumpulan data; observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Adapun lokasi yang dipilih merupakan kawasan- pinggiran perkotaan. Studi ini menghasilkan beberapa temuan yaitu adanya disparitas perubahan konteks lanskap sosial-politik daerah pinggiran yang berbeda dalam bentuk dan model intervensinya sehingga menyebabkan warganya semakin individualis dan kapitalis dan semangat komunalitas warganya semakin tergerus, terdapat konteks masyarakat yang ‘terbelah’ pada wilayah Beluluk dan Kace Timur dalam konteks semangat kewargaan daerah pinggiran yang menjadi arena transit ekonomi warga dan semangat kolektif warga. Selain itu, eksistensi modal sosial warga dan aktivasi politik warga di tiga kampung-kota tersebut terlihat perbedaan mencolok dalam hal resiliensi terhadap berbagai aspek identitas lokal masing-masing daerah seperti tradisi budaya lokal, pergeseran makna, dan modal sosial warganya.

Kata Kunci: Demografi Politik; Lanskap; Kewargaan; Kampung-Kota; Pangkalpinang

Abstract

Pangkalpinang continues to transform into a modern small town and certainly faces various dynamics of problems and complex challenges in citizenship. The complexity of urban citizenship has a diverse context, in accordance with the political demographics of suburban citizenship. This study compares the socio-political landscape and the dynamics of the challenges in the three research locations: Tuatunu, Kace Timur, and Beluluk, which are reflected in the daily political structure of citizenship. It uses qualitative approach based on observation, depth interview, and documentation. The findings reveal that the disparity of form and model of intervention in the changing context of the peripheral socio-political landscape causes the citizens being individualistic and capitalist and their spirit of communality increasingly eroded, there is a split community in Beluluk and Kace Timur in the context of the spirit of peripheral citizenship as the economic transit for citizens and the challenge of building a collective spirit of citizens. Furthermore, the social capital and political activity of citizens in the three villages shows a sharply difference in terms of resilience to various aspects of the local identity of each region such as the local cultural traditions or a shift of meaning and citizens' social capital.

Keywords: Political Demography, Landscape, Kewargaan, Kampung-Kota, Pangkalpinang

¹ Jurusan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung
Email: rendy@ubb.ac.id

² Jurusan Sastra Inggris, Universitas Bangka Belitung

³ Jurusan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung

PENDAHULUAN

Kemajuan sebuah negara ataupun daerah pada dasarnya sangat ditentukan oleh konteks kemajuan kampung, pinggiran (*periphery*) atau desa yang menjadi episentrum penting, sekaligus strategis dalam rangka penguatan berbagai aspek potensial yang ada. Salah satu konteks penting dan sangat strategis berkaitan dengan eksistensi ‘kampung kota’ ataupun desa yaitu berkaitan dengan bagaimana realitas pembibitan ruang-ruang politik demokrasi dan demokratisasi mampu dikelola, direspon, dan dikontekstualisasi secara optimal dalam rangka menggarap berbagai potensi sumberdaya daya desa, baik potensi fisik maupun nir-fisik. Konteks tersebut, tentu pada gilirannya sangat berpengaruh signifikan terhadap penguatan kesadaran masyarakat secara diskursif dan demokratis (Rendy, 2017), khususnya dalam rangka menopang berbagai program dan agenda pemerintah daerah guna menciptakan keberdayaan serta keteraturan sosial politik masyarakat kampung, sekaligus guna mengakselerasi ruang kesejahteraan secara demokratis, adil dan merata.

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tentu posisi kampung menjadi semakin strategis dan kuat. Berbeda halnya ketika posisi politik desa masih berbasis pada regulasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kini posisi politik desa atau ‘kampung’ telah memiliki regulasi tersendiri sehingga memiliki fokus dan perhatian yang lebih kuat jika dibandingkan dengan rentang waktu lebih dari satu dasawarsa terakhir. Terlebih dengan terus meningkatnya potensi anggaran pembangunan yang dilakukan, baik di tingkat desa maupun kelurahan setiap tahunnya. Itu artinya ada begitu banyak ruang dan potensi bagi pemerintahan di level yang paling dekat masyarakat untuk bisa meningkatkan kualitas dan mutu tata kelola sumberdaya

yang ada agar benar-benar mampu memberikan ruang ‘keberdayaan’ dan kemanfaatan yang begitu luas dan merata bagi kesejahteraan masyarakat lokal di desa ataupun kampung. Konteks keberdayaan dan kesejahteraan yang dimaksud tentu tidak sekedar pada konteks ekonomi dan materi semata, karena bagaimanapun juga terdapat ruang keterlibatan atau partisipasi masyarakat yang terefleksi dalam praktik politik keseharian warganya dalam merespon setiap isu, masalah, dan wacana yang berkembang di lingkungan pemerintahan dan masyarakatnya.

Demografi politik daerah pinggiran merupakan salah satu diskursus penting untuk memetakan sekaligus membaca realitas lanskap (Gerry Van Klinken, 2014), dan juga potensi politik ‘kewargaan’ masyarakat di lingkungan kampung, desa, atau konteks ‘kampung-kota’ yaitu posisi masyarakat yang memiliki posisi dan karakteristik wilayah pinggiran atau posisinya sosial politiknya tidak terlalu berjarak dengan ruang-ruang perkotaan. Kajian ini tentu ini juga melakukan perbandingan tentang model lanskap sosial politik daerah pinggiran, khususnya konteks ‘kampung-kota’ (Sugiato, 2006), yang mana sedang dan terus menghadapi dinamika perubahan konteks perkotaan dari berbagai dimensi arsitektur, aksesibilitas, struktur sosial, budaya, sikap politik dan lokalitas masyarakatnya.

Studi ini mengkaji juga tentang bagaimana realitas lanskap dan format sosial politik yang menjadi basis keseharian warga di lingkungan pinggiran kota. Sejauhmana kemudian perbedaan dimensi ruang interaksi sosial politik keseharian warga mempengaruhi basis kewargaan mereka. Realitas ini juga sangat penting untuk menjadi dasar pijakan bagi upaya perbaikan dan penguatan praktik demokrasi, dan demokratisasi di lingkungan pinggiran, khususnya yang memiliki karakteristik

'kampung-kota'. Demikian halnya dengan konteks Tuatunu, Kace Timur, dan Beluluk sebagai bagian dari konteks kewilayahan yang memang memiliki karakteristik pinggiran kota karena dari sisi jarak ketiga daerah ini memiliki basis posisi yang sangat berdekatan dengan ruang-ruang perkotaan. Pun demikian, jika ditinjau dari aspek administratif pemerintahan, tentu tiga wilayah ini merupakan wilayah dari tiga kabupaten/kota yang berbeda. Tuatunu sendiri merupakan bagian dari Kota Pangkalpinang. Kemudian, Kace Timur sendiri merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bangka, sementara untuk Beluluk sendiri merupakan bagian administratif dari Kabupaten Bangka Tengah.

Ketiga wilayah tersebut memiliki karakteristik 'kampung-kota' karena memiliki struktur dan karakteristik wilayah yang bersinggungan kuat dengan konteks perkotaan Kota Pangkalpinang. Bagaimanapun juga, Pangkalpinang sendiri merupakan episentrum sebagai pusat ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Posisi tiga 'kampung-kota'; Tuatunu, Kace Timur, dan Beluluk sendiri di satu sisi memang merupakan bagian dari arena perkampungan yang konektivitas sosial politik, dan ekonominya tidak bisa dilepaskan begitu saja dari entitas Kota Pangkalpinang sebagai ibu kota sekaligus pusat kekuasaan pemerintah. Tentu ada berbagai aspek yang bertumpu disana, mulai dari daya tarik ekonomi pasarnya, sosial, budaya, dan berbagai infrastruktur publik yang relatif banyak terkonsentrasi disana.

Posisi Tuatunu, Kace Timur, dan Beluluk sendiri merupakan daerah yang dikategorisasi sebagai daerah pinggiran (*pheriphery*). Termasuk juga realitas struktur politik pada lingkungan masyarakat di ketiga wilayah tersebut yang terus mengalami dinamika tantangan dan perubahan yang perlu direspon atau

disikapi secara responsif dan akuntabel. Selain itu, di tengah modernitas kemajuan berkota yang terus digeliatkan oleh pemerintah daerah, tentu terus tumbuh dan berkembang berbagai dinamika tantangan dan kompleksitas yang dihadapi oleh ketiga daerah tersebut. Studi ini tentu diarahkan mampu menjadi basis dan dasar pijakan ilmiah, agar konteks politik tata kelola dan perlakuan terhadap konteks demografi sehari-hari warga 'kampung-kota', khususnya yang berdiam pada wilayah pinggiran bisa sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip yang lebih demokratis, partisipatif, humanis dan berkeadilan.

Oleh karena itu, tentu studi komparasi ini menjadi perlu dan menarik untuk dilakukan karena untuk melakukan rangkaian analisis mendalam atas berbagai realitas lanskap sosial politik kewargaan masyarakat di tiga arena tersebut. Ini tentu pada gilirannya diarahkan mampu dalam membangun konsep dan praksis pembangunan yang lebih sensitif terhadap berbagai disparitas perbedaan sosial politik dalam rangka penguatan basis demokrasi dan demokratisasi yang berlangsung dalam praksis sosial politik keseharian warga di lingkungan masyarakat ketiga daerah tersebut. Kajian ini juga menjadi bahan reflektif-kritis bagi pembacaan realitas politik demografi 'kampung-kota' dengan berbagai bentuk representasi politik dan model demokrasi sehari-hari warganya, baik daerah yang terus bertumbuh-kembang, ataupun daerah yang mengalami berbagai problem patologi sosial. Jadi, berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka kajian penelitian ini dirumuskan pada beberapa rumusan masalah mendasar, diantaranya:

1. Bagaimana perbandingan lanskap sosial politik demografi 'kampung-kota' pada daerah pinggiran Tuatunu, Kace Timur, dan Beluluk?
2. Sejauhmana kemudian perbedaan konteks lanskap sosial politik

tersebut disikapi dan disiasati oleh masyarakat dan para pengambil kebijakan?

Studi ini tentu pada gilirannya juga melakukan elaborasi mendalam guna melakukan upaya komparasi atas realitas lanskap sosial politik yang mampu menghadirkan ruang-ruang politik yang memudahkan dan memungkinkan (*enable*) tumbuh-kembangnya ruang deliberatif, akses dan politik kewargaan pada tiga daerah pinggiran tersebut, atau sebaliknya justru membatasi akses dan ruang ekspresif warga untuk aktif-kontributif dalam masyarakat dan pemerintahan. Fokusnya yaitu melihat bagaimana lanskap sosial politik pada daerah pinggiran ‘kampung-kota’, lalu sejauhmana kemudian posisi masyarakat atau elit itu sendiri, seberapa aktif mereka dalam merespon realitas tersebut? Dalam konteks ini, bagaimana basis lanskap sosial politik tersebut bisa berkaitan kuat dengan konteks penguatan kesadaran kolektif warga dalam praksis demokrasi dan demokratisasi. Studi ini tentu sangat kontributif dalam memenuhi beberapa tulisan teoritis maupun praktis terkait diskursus politik demografi daerah pinggiran yang menjadi salah satu kajian yang penting dan perlu mendapatkan banyak perhatian.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam studi ini yaitu menggunakan kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Selain itu, untuk melengkapi rangkaian kajian ini, maka penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi literatur. Adapun yang menjadi fokus utama kajian ini yaitu berkenaan dengan demografi politik dan politik demografi ‘kampung-kota’ yang berada pada kawasan pinggiran Kota Pangkalpinang dengan mengambil tiga lokus penelitian, yakni Kawasan Desa Tua Tunu, Beluluk, dan Kace Timur. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik observasi

secara langsung, kemudian wawancara secara mendalam (*in dept interview*), dan pendekatan *purposive sampling*; yang dalam hal ini pemilihan dan penentuan para informan didasari pertimbangan bahwa para informan tersebut memiliki berbagai informasi dan data sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini (Moleong, 2002); (Kriyantno, 2006); (Ibrahim, 2016)) Adapun yang menjadi kriteria yaitu mereka para perangkat desa/kelurahan, para muda-mudi desa yang memiliki mobilitas keaktifan dalam berbagai organisasi di tingkat desa, serta para tokoh agama dan masyarakat yang ada di tingkat desa.

PEMBAHASAN

Perspektif ‘Kampung-Kota’

Terkait kajian penelitian tentang politik pedesaan, politik kampung atau politik ‘kampung-kota’ memang bisa dikatakan relatif masih tergolong sangat jarang. Walaupun sudah ada, itupun masih terbatas pada kajian yang mempersoalkan tentang dinamika konflik, dan konteks patologi kemiskinan yang menjadi salah problem dalam kehidupan masyarakat pinggiran perkotaan ataupun pada lingkungan pedesaan. Demografi politik ‘kampung-kota’ menjadi diskursus menarik terkait realitas sosial politik yang saling bermunculan. Realitas demografi politik masyarakat menjadi arena pertarungan kekuasaan di tingkat lokal, baik dalam konteks elektoral maupun *daily politics*.

Istilah kampung-kota tentu memiliki banyak definisi dan pengertian. Setidaknya kampung-kota menggambarkan kondisi kampung yang berada di wilayah pinggiran perkotaan ataupun yang berada di wilayah pertengahan kota. Pun demikian, konteks kampung-kota tentu tidak lepas dari konteks historiografi perkampungan yang sudah terkenal sejak zaman Belanda yang memiliki fungsi sebagai tempat atau arena permukiman para penduduk pribumisasi.

Bahkan beberapa definisi justru mengkonsepsikan kampung sebagai tempat tinggal orang-orang *kolot*, *udik*, dan terpinggirkan, pun begitu, dalam konteks kampung, di dalamnya tersimpan sikap dan ruang kebersahajaan, kesederhanaan, dan keluguan. Dalam konteks ‘kampung-kota’, Tuatunu menjadi ruang sekaligus episentrum penting yang kehadirannya tidak lepas dari wilayah administratif Kota Pangkalpinang. Diskursus kampung kota, tentu juga berkaitan dengan tumbuh-kembang ‘kampung-kota’ yang seakan kian terjerat dan tidak bisa lepas dari perkembangan dan modernisasi kota.

Beberapa kajian penelitian terkait politik warga kampung Sosrokusuman dan kampung Sari Mulyo di Jogjakarta (Budiawan, 2006) yang berhasil membaca bagaimana persinggungan warga Kampung Sarimulyo dan Sosrokusuman yang mencoba untuk terus menghadirkan nuansa lokalitas daur hidup, khususnya melalui tradisi *Selapanan* atau semacam tradisi selamatan di tengah masa krisis yang mereka hadapi. Yang menarik tentu yaitu tradisi *Selapanani* bisa menjadi salah satu media penguat tradisi lokal di tengah dinamika perubahan yang semakin moderen dan terglobalisasi. Hasil kajian tersebut berhasil menjelaskan betapa kemudian nilai-nilai lokal atau yang bernuansa kampung dan desa masih tetap mampu lestari dan eksis di tengah geliat perubahan dan gaya hidup masyarakat perkotaan yang sudah semakin gaul, moderen dan glamor. Jadi tetap ada konteks mata rantai yang tidak terputus dengan proses kemajuan kotanya. Pun demikian, tentu tetap saja ada begitu banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi masyarakat yang bergulat pada pelestarian dan pertahanan tradisi lokalitas. Inilah kemudian yang berhasil dikonseptualisasikan menjadi konteks glokalitas *Selapanan*.

Konteks ini relevan dengan konseptualisasi demokrasi (Santoso, 2013) yang menekankan betapa pentingnya demokrasi dan demokratisasi yang tak hanya sekedar isu-isu politik semata, akan tetapi bagaimanapun juga politik harus perhatian terhadap isu-isu budaya. Lebih lanjut, dimensi budaya dan politik haruslah dikemukakan dan diekspresikan. Ini artinya bahwa demokrasi dipahami sebagai perilaku kolektif dalam dimensi institusionalisme, oleh karenanya, demokrasi merupakan konstruksi ideal yang harus berlangsung dalam level kelembagaan yang menghendaki adanya kontekstualitas (Santoso dalam Ibrahim, 2016). Demikian halnya dalam konteks demografi warga pada arena ‘kampung-kota’ yang memiliki karakteristik yang sangat beranekaragam.

Lanskap Sosial Politik Demografi

Lanskap sendiri merupakan realitas tata ruang dalam sebuah arena ruang atau model tata ruang yang membentang dan merepresentasi konteks visualnya. Konteks lanskap menjadi konteks yang bisa dirasakan. Lanskap juga bisa dianggap sebagai potret pemetaan atas gejala sosial dan berbagai aspek kehidupan sosial lainnya yang tentunya memiliki konteks keteraturan antara yang satu dengan yang lainnya. Politik demografi sendiri merupakan salah kajian politik kependudukan yang berdimensi sosial politik. Struktur sosial politik dikerangkai dengan menggunakan politik demografi agar kajian analisis terhadap fenomena kependudukan tidak lagi terbatas pada nilai-nilai angka statistik. Oleh karena itu, kemudian, hadirilah politik demografi sebagai alternatif untuk menggali penjelasan-penjelasan atas realitas sosial melalui perspektif politik kritis analitis.

Konteks demografi dalam *Landskap* politik di Indonesia sendiri tentu bukanlah sebatas berwajah teknokratis semata

(Ibrahim, 2016), akan tetapi juga dipengaruhi dan dideterminasi oleh konteks kekuasaan. Realitas sosial politik yang dimaksud tentu tidak sekedar hanya dalam ruang pertarungan politik elektoral semata, akan tetapi juga menyebar dan meluas kepada konteks kewargaan atau konteks politik keseharian warga dalam mensikapi dan merespon setiap ruang perubahan yang terjadi di lingkungan mereka. Lanskap sosial politik demografi juga dimaknai sebagai bagian dari ruang 'politik demografi' (Ibrahim, 2016) yang justru menjadikan basis demografi sebagai sasaran dalam rangka mencapai atau meraih suatu tujuan. Lebih lanjut, politik demografi erat kaitannya dengan konteks kehidupan sosial dengan berbagai problem patologi sosial kependudukannya yang sangat berkaitan erat dengan struktur sosial, tradisi budaya, identitas dan konteks perekonomian masyarakatnya. Bagaimanapun juga konteks tersebut saling berkaitan satusama lain.

Lanskap sosial politik demografi juga dimaknai sebagai bagian dari ruang 'politik demografi' (Ibrahim, 2016) yang justru menjadikan basis demografi sebagai sasaran dalam rangka mencapai atau meraih suatu tujuan. Lebih lanjut, politik demografi erat kaitannya dengan konteks kehidupan sosial dengan berbagai problem patologi sosial kependudukannya yang sangat berkaitan erat dengan struktur sosial, tradisi budaya, identitas dan konteks perekonomian masyarakatnya. Bagaimanapun juga konteks tersebut saling berkaitan satusama lain. Dalam demografi, lanskap sosial politik dapat dilacak melalui realitas warga dalam mencapai konsensus. Hal ini juga berkaitan dengan ikhtiar antar warga: sudah sejauhmana misalnya ruang yang memungkinkan antar warga untuk saling mengekspresikan semangat kebersamaan dan juga semangat untuk membicarakan dan mengusahakan nasib bersama. Dalam konteks ini, derajat konsensus sangat dipengaruhi oleh perilaku warganya yang

sangat kolektif dan tidak individualis. Spirit kolektif menjadi salah satu prasarat penting dari upaya untuk mencapai konsensus. Semakin rumit proses warga untuk memperoleh konsensus semakin besar potensi konflik antar warga dalam upaya mencapai tujuan bersama.

Konsep dan Konstruksi Daerah Pinggiran (*Periphery Area*)

Terkait konsep dan konstruksi daerah pinggiran merupakan sebuah konsep yang pertama-tama pernah dikemukakan oleh Pelbrisch pada tahun 1949. Konsep pinggiran menjadi salah satu kajian penting dalam konteks analisis pembangunan sosial di masyarakat. Bahkan John Friedman pernah menjelaskan terkait analisisnya pada keterkaitan dan adanya konteks saling mempengaruhi antara pembangunan kota (*core*) dan pembangunan desa atau kampung (*periphery*).

Konteks daerah pinggiran, atau dalam kawasan perkotaan terdapat kampung yang memiliki karakteristik yang bermacam model dan karakteristik. Oleh karena itulah, realitas dan dinamika perubahan pada daerah pinggiran selalu menghadapi situasi sosial politik yang sangat dinamis dan tidak jarang justru memunculkan kondisi yang begitu kompleks. Kompleksitas yang diharapkan warga tentu juga memerlukan semangat kolektif warga bersama para pengambil kebijakan dalam menuntaskan berbagai persoalan yang terdapat di 'kampung-kota'. Di satu sisi ada warga yang tetap ingin menjadi bagian kesatuan dari wilayah perkotaan, namun di sisi lain juga ada yang begitu berharap setidaknya tetap menjadi bagian yang tidak terlalu 'penuh', masuk pada bagian kesatuan dari sebuah kota. Tantangan perubahan berikutnya juga besar yaitu seiring dengan jumlah pertambahan penduduk yang sangat tinggi setiap tahunnya, yang dianggap justru bisa menjadi penjasar betapa kemudian kompleksitas persoalan yang dihadapi di

daerah pinggiran terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktunya.

Realitas Lanskap Sosial-Politik pada 3 Arena Studi

Adapun gambaran umum terkait daerah atau arena yang menjadi lokus dari penelitian ini diantaranya yaitu terdapat 3 (tiga), diantaranya yaitu Kampung Tuatunu (Kelurahan Tuatunu), Kampung Kace Timur (Desa Katim), dan Kampung Beluluk (Desa Beluluk). Secara geografis, posisi ketiga wilayah dari tiga konteks kampung ini sama-sama berada pada arus pinggiran (*periphery*) atau berada pada lintasan pinggiran pada struktur wilayah perkotaan Kota Pangkalpinang. Inilah yang menjadi salah satu basis argumentasi mengapa kemudian ketiga wilayah tersebut, jika ditinjau dari posisi dan karakteristik demografi sosial-politiknya bisa disebut sebagai bagian dari konteks ‘kampung-kota’ yang memiliki fungsi dan struktur masyarakat yang sangat khas dan unik satu sama lain.

Dalam konteks realitas sosial-politik kehidupan masyarakat di Kelurahan Tuatunu, Desa Kace Timur dan Desa Beluluk, pada dasarnya memiliki ruang dan mobilitas partisipasi masyarakat yang memiliki warna serta karakteristik yang berbeda-beda. Partisipasi aktif dan semangat kolektif warganya dalam konteks masyarakat Tuatunu yang begitu aktif dan partisipatif menjadi penjabar betapa logika komunalitas warga menjadi sangat penting sebagai salah satu modal sosial bagi pihak pemerintahan lokal dalam mengelola tertib sosial keseharian warganya.

Selain itu, hampir setiap program pembinaan, program pembangunan, dan program pengambilan keputusan selalu terbuka ruang yang leluasa bagi publik warganya untuk terlibat secara aktif sehingga *sense of belonging* terhadap nasib kemajuan dan kelestarian adat budaya lokal menjadi sangat kuat. Dalam

hal ini ada model kemitraan yang begitu terawat kuat dalam keseharian publik warganya. Ini tentu menjadi modal penting dalam memperkuat tujuan bersama, baik dalam konteks sosial, budaya, agama dan kesejahteraan ekonomi.

Posisi dari tiga kampung tersebut berada pada wilayah administratif pemerintahan yang berbeda-beda. Tuatunu misalnya merupakan bagian kewilayahan administratif Kota Pangkalpinang. Sementara itu, Desa Kace Timur merupakan bagian dari wilayah administratif Kecamatan Mendobarat Kabupaten Bangka, dan Desa Beluluk merupakan bagian dari wilayah administratif Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah. Dengan demikian, sangat menarik kemudian untuk menelusuri konteks politik demografi pada tiga arena pinggiran tersebut. Pada bagian ini dijelaskan kilasan gambaran dari kewilayahan ‘kampung-kota’ tersebut secara umum. Berikut gambaran umumnya:

a. Kampung Tuatunu

Jauh sebelum menjadi bagian dari Kelurahan Tuatunu Indah, desa ini pada awalnya merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Bangka. Jika ditinjau lagi tentang asal muasal administratif Tuatunu, sebelumnya Tuatunu merupakan desa yang menjadi bagian wilayah administratif Kabupaten Bangka. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, tepatnya dimulai ketika adanya Peraturan Daerah (Perda) No.7 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan yang mengacu berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1984 yang terdiri dari 4 Kecamatan, 55 kelurahan, dan 3 desa, yang kemudian digabung menjadi 35 kelurahan. Tuatunu menjadi salah satu desa yang otomatis berubah statusnya menjadi salah satu kelurahan di Kota Pangkalpinang (Elvian,

2010) 'Kampung Tuatunu' atau Kelurahan Tuatunu Indah merupakan salah satu kelurahan dari 36 kelurahan yang ada di Kota Pangkalpinang. Adapun batas-batas administratif wilayah Tuatunu diantaranya:

- 1) Sebelah Utara Tuatunu berbatasan dengan Desa Balunujuk Kabupaten Bangka,
- 2) Sebelah Selatan Tuatunu berbatasan dengan Desa Kace Kabupaten Bangka,
- 3) Sebelah Barat Tuatunu berbatasan dengan Desa Air Duren Kabupaten Bangka,
- 4) Sebelah Timur Tuatunu berbatasan dengan tiga kelurahan; yaitu Kelurahan Bukit Merapin, Kelurahan Kacang Pedang, dan Kelurahan Air Salemba.

Sementara itu, jika ditinjau dari sudut historiografi kewilayahan, tepatnya pada fase-fase Inggris dan Belanda berkuasa, Kampung Tuatunu dulunya justru merupakan salah satu bagian dari distrik Pangkalpinang. Ini juga tidak lepas dari konteks politik kekuasaan kolonial yang begitu berkepentingan dengan konteks penguasaan sumberdaya timah dan lada yang menjadi komoditas strategis dan bernilai ekonomi tinggi. Jika mengutip *Kaart van eiland Banka 1819* (Elvian, 2010), Kampung Tuatunu atau *Toutuna* merupakan salah satu bagian kampung yang posisinya berada pada jalan darat yang menghubungkan wilayah barat dan tengah pulau Bangka (dari Muntok hingga ke Tuatunu/ *Toutuna* dan Pangkalpinang).

Demografi Berkampung

Jika ditinjau dari konteks demografi Tuatunu, masyarakatnya mayoritas merupakan orang Melayu yang tentunya juga memiliki struktur dan sistem sosial politik bermasyarakat yang begitu kental dengan unsur-unsur kemelayuan. Bahkan jika diamati dari potret keseharian kehidupan dan mobilitas

kewargaannya, kemudian dari tradisi atau adat-istiadat masyarakatnya yang begitu kental dengan budaya melayu, kemudian yang paling mencolok misalnya terkait dengan model perumahan atau rumah tinggal yang dikembangkan masyarakat lokal Tuatunu. Konteks rumah atau tempat tinggal warganya sebagian besar justru terlihat sekali dengan karakteristik khas masyarakat melayu.

Konteks pemukiman masyarakat Tuatunu juga berkaitan erat dengan semangat komunalitas warganya yang begitu kental dalam berbagai aspek kehidupannya, mulai dari kepentingan pencahariannya di kebun, aktivitas peribadatan warga, sampai dengan struktur perkampungannya yang berbeda dengan kebanyakan masyarakat lainnya yang terdapat di Kota Pangkalpinang. Bahkan konteks bangunan dan susunan pembangunan rumah antar warga yang terlihat sama dan terkesan tersusun rapi memanjang di sepanjang pinggir jalan kampung merupakan model kampung yang sengaja disiasati oleh Pemerintahan Kolonial Belanda pada waktu itu. Bagi pihak kolonial, model pengembangan perumahan yang berjejer memanjang di sisi kiri kanan jalan, dan terkonsentrasi di sepanjang wilayah kampung merupakan siasat dan strategi mereka agar lebih efektif dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap mobilitas warga, baik untuk kepentingan perlawanan maupun untuk kepentingan kemudahan bagi pihak kolonial Belanda dalam melakukan pemungutan, penertiban, dan juga pendisiplinan terhadap warga yang dianggap membangkang dan memberontak pemerintah pada waktu itu. Pun demikian, kondisi kampung pada waktu itu tetap saja sepi dan tidak terlihat aktivitas mencolok dari penduduk.

Hal tersebut dikarenakan sebagian besar penduduk justru mengindahkan pengaturan yang dilakukan oleh Belanda agar penduduk bisa tinggal dan menetap di kampung. Yang terjadi justru sebagian

besar warga tetap menetap di tengah-tengah hutan atau *ume* (ladang pertanian padi darat), yang mana terdapat pondok-pondok tradisional yang terbuat dari kulit kayu. Pondok ini menjadi tempat beristirahat warga yang sehari-hari berkebun lada atau berbagai tanaman penyela lainnya. Potret ini juga berlangsung dan tersebar hampir di sebagian besar wilayah yang penduduknya mayoritas berkebun lada, khususnya yang berdiam di kampung-kampung yang tersebar di kabupaten/ kota di pelosok Bangka Belitung. Informasi ini disarikan dari beberapa proses wawancara dan diskusi dengan beberapa warga; Bokher (74thn), Saimi (65thn), Rosyidi Taat (68thn). Selain itu, informasi ini juga disarikan dari hasil diskusi panjang peneliti dengan Erwiza Erman, selaku sejarawan yang banyak melakukan kajian penelitian tentang isu historiografi pertambangan di Bangka Belitung.

Berdasarkan penelusuran lapangan, dalam konteks kehidupan masyarakat Tuatunu, terlihat sekali kekentalan budaya dan semangat masyarakat lokal dalam melestarikan adat-istiadat yang menjadi karakteristik khas warga melayu Kampung Tuatunu. Ada beberapa konteks kearifan lokal yang menjadi instrument penting dalam merawat struktur kewargaan, sekaligus dalam rangka menguatkan struktur demografi sosial politik warga Tuatunu yang sangat terbuka, religious, dan memiliki sikap keramah-tamahan yang sangat kuat antar sesama warga, baik di dalam maupun warga pendatang.

Di Tuatunu terdapat beberapa konteks kearifan lokal, baik berdimensi sosial, ekonomi maupun politik yang menjadi ciri khas pembeda warga Tuatunu dengan warga lainnya di luar Tuatunu. Misalnya; terdapat tradisi *Nganggung*, tradisi ruwahan, tradisi maulid Nabi, tradisi bekelakar, tradisi dan adat-istiadat Islam yang masih telestasi dengan baik.

Selain itu, mobilitas berkebun warga yang masih sangat tinggi menjadi kearifan tersendiri bagi warga dalam menjaga model ekonomi yang relatif masih tradisional, komunal dan begitu menjunjung tinggi nilai-nilai solidaritas, nilai komunalitas, dan nilai kekeluargaan yang tinggi antar warga.

Pada masyarakat Kampung Tuatunu dikenal sebagai daerah dengan penduduknya yang masih mempertahankan erat tradisi dan budaya melayu, spirit komunalitas warga yang masih terjaga, rumah-rumah bergaya arsitektur melayu tradisional atau bergaya lama menyebar di sudut-sudut kampung, termasuk juga konteks religiusitas warga yang masih mengakar kuat dalam keseharian warganya, tentu menjadi penjabar betapa kemudian lanskap sosial politik pada kehidupan masyarakat Tuatunu begitu kuat dan dinamis sehingga mampu melakukan berbagai penetrasi atas berbagai ‘kemajuan’ dan kemoderenan dalam konteks berkota.

Ruang Publik dan Politik Kewargaan di Tuatunu

Jika ditinjau dari konteks keberadaan ruang publik (*public sphere*) tentu Tuatunu memiliki ruang publik yang relatif masih sangat alami dan tersebar di berbagai penjuru kampung. Ini menjadi arena penting, sekaligus strategis dalam menyambung tali persaudaraan antar warga. Di sini, bisa diartikan juga bahwa interaksi kewargaan menjadi lebih intensif jika dibandingkan wilayah lainnya di Kota Pangkalpinang, karena Tuatunu menjadi satu-satunya kawasan perkotaan yang berkarakteristik kampung, yang sampai saat ini masih menjaga erat konteks kemelayuan yang menampilkan potret demografi sosial politik yang sangat dinamis dan mampu merekatkan ruang deliberatif atau komunikasi serta hubungan emosional antara warga kampung.

Di Tuatunu ada beberapa macam ruang, baik formal maupun informal yang menjadi arena diskursif bagi warga kampung untuk mengelola nasib bersama. Misalnya; dalam setiap tahun ada beberapa momentum yang bisa menjadi ruang bagi khalayak warga, atau perwakilan dari warga untuk terlibat dalam menjaga tertib sosial atau keteraturan sosial. Ini melibatkan pihak pemerintahan desa/ kelurahan, dan juga melibatkan pihak aparat keamanan (khususnya Babinkamtibnas), serta pihak pemuda-pemudi yang tergabung dalam komunitas-komunitas lokal, mulai dari yang berbasis agama, maupun yang berbasis sosial kemasyarakatan.

Jika ditinjau dari aspek partisipasi warga di Tuatunu, partisipasi masyarakatnya dalam konteks pemilihan umum (PEMILU), atau berbagai momentum electoral lokal maupun nasional, masyarakat Tuatunu memiliki kecenderungan partisipasi yang relatif sangat kuat, baik dalam konteks partisipasi politik formal maupun informal. Selain itu, partisipasi pemuda-pemudi kampung dalam berbagai ruang-ruang sosial keagamaan menjadi salah satu penjelaras betapa masyarakatnya memiliki atensi serius dalam merespon setiap ruang politik yang memiliki tujuan untuk kepentingan bersama.

b. Kampung Kace Timur

Kampung Kace Timur sebelumnya merupakan bagian kesatuan dari Desa Kace Kecamatan Mendobarat Kabupaten Bangka. Kace Timur merupakan wilayah yang secara geografis berada pada sisi barat Kota Pangkalpinang. Kace Timur menjadi salah satu desa yang memiliki karakteristik ‘kampung-kota’ yang sangat unik dari berbagai lanskap sosial politiknya. Tentu ada beberapa konteks yang menghadirkan potensi serta tantangan tersendiri bagi praktik kewargaan yang berlangsung di Kace Timur. Salah satu keunikan yang terdapat

di Desa Kace Timur yaitu status penduduknya yang sebagian besar masih berstatus kependudukan sebagai warga Pangkalpinang. Hal ini dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) warganya yang justru masih banyak yang ber-KTP Pangkalpinang.

Demografi Berkampung

Jika ditinjau dari konteks demografi Kace Timur, masyarakatnya cukup heterogen. Pun demikian, mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Dari potret keseharian kehidupan dan mobilitas kewargaannya, masyarakat yang berdomisili di Kace Timur begitu terbuka dengan pendatang. Dalam konteks demografi kampung di Kace Timur, ada konteks keterbelahan sosial yang mewarnai dinamika kehidupan masyarakat sehari-hari. Pun demikian, konteks tersebut tidak mengarah kepada potensi konflik yang serius, baik vertical maupun horizontal. Hal ini dikarenakan praktek kewargaan yang berlangsung dalam keseharian warga di Kace Timur terbilang sangat aktif dan diskursif. Hal ini terlihat dari keaktifan dari warga desa dalam merespon setiap isu pemerintahan yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan warganya. Beberapa isu krusial yang kerap memunculkan partisipasi aktif dan kritis dari warga, misalnya dalam isu aspirasi masyarakat agar Kace Timur bisa lepas dari wilayah administratif Kabupaten Bangka, dan bisa dialihstatuskan menjadi wilayah administratif Kota Pangkalpinang.

Selain itu, dinamika politik dan bekerjanya demokrasi antagonistik juga tampak dalam dinamika sosial politik sehari-hari warga (Diamond, 2003), termasuk misalnya dalam konteks adanya tuntutan masyarakat lokal agar Kepala Desa yang dianggap tidak mampu bekerja, ataupun ditengarai warga melakukan praktik tata kelola pembangunan dan keuangan yang kurang demokratis, maka

muncul tuntutan agar pejabat Kepala Desa Kace Timur bisa mundur. Belum lagi sengketa batas wilayah dan juga rawan konflik juga menjadi arena diskursif bagi warga untuk berpartisipasi secara aktif dan kritis.

Struktur perumahan di Kace Timur relatif beranekaragam, dan sebagian besar terlihat sudah sesuai dengan konteks arsitektur moderen. Jadi, hampir sulit menemukan gaya perumahan atau rumah tempat tinggal yang bergaya arsitektur tua atau lama. Struktur kewargaan yang terjalin di Kace Timur juga juga sangat berlangsung harmonis. Walaupun kemudian ada konteks pengelompokkan warga pada prinsip dan praktek keagamaan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Ruang Publik & Politik Kewargaan di Kace Timur

Jika ditinjau dari konteks keberadaan ruang publik (*public sphere*) di Kace Timur, tentu ruang ibadah atau masjid menjadi satu-satunya ruang deliberatif bagi pertemuan warga dari berbagai kelas dan strata sosial. Yang menarik adalah adanya model pengelompokkan berdasarkan basis aliran pemahaman dan praktek keagamaan. Di satu sisi ada kelompok warga dari sisi timur yang memosisikan diri sebagai kelompok masyarakat asli kampung yang masih begitu berharap dengan penguatan nilai-nilai lama atau praktek religiusitas yang sangat identik dengan pelestarian adat-istiadat dan budaya lokal. Sementara di sisi lain, ada kelompok warga di sisi timur yang kemudian memosisikan diri sebagai kelompok masyarakat fleksibel dalam menjalankan praktek keagamaan. Pun demikian, posisi tersebut sebetulnya saling menegaskan dalam praktek kehidupan dan aktivitas keagamaan warga sehari-hari. Yang menarik adalah ruang pengajian menjadi arena yang mampu mempersatukan berbagai kelompok

masyarakat yang ‘terbelah’ dalam melakukan praktek keagamaan sehari-hari. Selain itu, kehadiran organisasi PKK di tingkat desa selama ini relatif aktif sehingga hal tersebut juga menjadi ruang bertumbuhnya nilai-nilai demokrasi partisipatif, baik secara formal maupun informal.

Bisa dikatakan, hampir sulit menemukan ruang publik khas atau khusus yang saling berjejaring menjadi arena intensif bertemu dan berinteraksinya antar warga dalam menjalin solidaritas sosial antar satu sama lain (Rahman, 2009). Selain itu, model pencapaian konsensus pada masyarakat Kace Timur juga sangat dinamis. Prinsipnya, ada semacam batas-batas tertentu yang membuat warga begitu solid dan punya semangat kolektif, akan tetapi ada batasan tersendiri yang menjadikan warga pada suatu waktu begitu individualis. Konteks ini relevan dengan pilihan sikap rasional (*rational choice*) yang mampu menimbang kepentingan individu dan kepentingan kolektif warga.

c. Kampung Beluluk

Kampung Beluluk merupakan bagian Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah. Kampung Beluluk sebelumnya merupakan bagian kesatuan dari Kampung Dul. Dari luas wilayah, Desa Beluluk memiliki wilayah dengan luas 6,3704 km dengan jumlah penduduk sebesar 5.052 jiwa. Fasilitas pendidikan bisa dikatakan masih sangat terbatas di wilayah ini. Terlihat dari jumlah TK ada 1 buah, SD 1 buah, dan SMK 1 buah. Di Desa Beluluk berkembang beberapa industri skala besar, kecil dan menengah. Terhitung ada 1 industri besar, 1 industri kecil, dan 20 industri rumah tangga (UMKM). Profesi masyarakatnya sangat beragam, mulai tenaga kesehatan, dokter, paramedis, bidan, dan terdapat dukun beranak.

Lebih lanjut, konteks pertambangan juga sempat berlangsung dalam mewarnai perekonomianarganya. Selain itu, ada beberapaarganya yang bergiat dalam budidaya sayur-sayuran untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pasar lokal.

Jika dilihat dari toponim Desa Beluluk, asal nama Beluluk berasal dari sebuah nama pohon yang banyak tumbuh di kawasan ini. Pohon ini biasa dikenal dengan pohon aren yang banyak digunakan penduduk untuk diambil niranya atau air yang biasa digunakan untuk membuat gula merah tradisional. Masyarakat setempat biasa menyebut beluluk dengan istilah Beluluk. Sampai saat ini pohon beluluk masih terdapat di wilayah desa ini.

Desa Beluluk sendiri merupakan wilayah pemekaran dari Kampung Dul, yang memiliki fungsi sebagai wilayah transit berbagai aktivitas barang dan jasa, atau bisa juga disebut semacam ‘gateway’; atau gerbang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karena keberadaan Bandara Depati Amir secara administratif masuk kedalam wilayah desa ini. Keberadaan Bandara Depati Amir sendiri diharapkan akan magnet bagi pembangunan desa Beluluk dari berbagai sektor.

- 1) Secara administratif Sebelah Utara Kampung Beluluk berbatasan dengan Kelurahan Kampung Dul;
- 2) Sebelah Selatan Kampung Beluluk berbatasan dengan Kampung Jeruk;
- 3) Sebelah Timur Kampung Beluluk berbatasan dengan Desa Padang Baru;
- 4) Sebelah Barat Kampung Beluluk berbatasan juga dengan desa Padang Baru.

Desa Beluluk didiami oleh berbagai etnis yang hidup berdampingan dengan suasana yang penuh persaudaraan, etnis atau suku tersebut adalah Cina, Melayu, Flores, Batak, Madura, Jawa, dan lain-lain dengan mata pencaharian masyarakat desa Beluluk adalah pada sektor perdagangan, jasa, PNS, buruh

harian, wiraswasta, petani, dan lain-lain. Satu hal yang menjadi kekhasan adat istiadat sosial budaya masyarakat desa Beluluk sejak dulu yang tetap terpelihara dengan baik sampai saat ini adalah nganggong dan juga adat istiadat dan budaya tionghoa.

Jika ditinjau dari konteks perekonomian lokalnya, Desa Beluluk bisa perlu mendapatkan perhatian semua *stakeholder*, khususnya berkaitan dengan pengembangan dan penguatan sektor perdagangan yang sangat pesat di kawasan ini. Di Beluluk terdapat Hotel Soll Marina, yang merupakan salah satu hotel berbintang kebanggaan masyarakat Bangka Belitung. Desa Beluluk juga memiliki model topografi yang unik karena terdapat daerah perbukitan yang memiliki panorama dan struktur bentang alam yang sangat menarik dan berpotensi sebagai salah satu atraksi wisata minat khusus berbasis alam. Di desa Beluluk juga terdapat beberapa kawasan perumahan yang mencerminkan bahwa desa ini sudah merupakan wajah sebuah perkotaan. Tidak mengherankan kemudian, sempat juga muncul riak-riak kecil beberapa warga yang menghendaki Beluluk menjadi bagian dari kelurahan di Pangkalpinang (Ibrahim, 2013).

Demografi Berkampung

Jika ditinjau dari konteks demografi Kampung Beluluk, masyarakatnya cukup heterogen. Pun demikian, masyarakatnya kurang lebih sekitar 60% mayoritas penduduk adalah etnis tionghoa. Sementara itu, pada Kampung Beluluk yang dikenal dengan penduduknya yang heterogen. Perkampungan ini terletak di kawasan perbatasan Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang. Pola interaksi yang terjalin pun berbeda. Hubungan sosial antara warga Beluluk Timur dan Barat tidaklah seakrab hubungan warga di bagian bagian Beluluk Timur. Di Beluluk bagian Timur, sekira pukul 9 malam,

masih banyak pintu rumah dan toko-toko usaha warga dibuka, sementara pada sisi timur, justru sebagian besar rumah warga sudah jarang yang terbuka. Situasi tersebut seakan membuka tangan bagi siapa saja yang ingin bertamu dan melakukan interaksi dan komunikasi ke sesama warga kampung. Kontras dengan suasana di Beluluk bagian Timur. Di waktu yang bersamaa, banyak rumah-rumah mendadak senyap dan sepi, seperti tak berpenghuni. Padahal, pagi hingga sore, rumah itu digunakan untuk menjual dan berdagang berbagai keperluan sehari-hari.

Ruang Publik & Politik Kewargaan di Kampung Beluluk

Jika ditinjau dari konteks keberadaan ruang publik (*public sphere*) di Beluluk, tentu ruang ibadah menjadi salah satu bagian yang penting di dalam masyarakat. Demikian juga kehadiran ruang publik pada konteks masyarakat di lingkungan Beluluk relatif sedikit jika dibandingkan dengan dua wilayah lainnya yang menjadi lokus dari penelitian ini. Karakteristik Kampung Beluluk yang memiliki corak semi perkotaan menyebabkan posisinya menjadi arena transit atas berbagai kegiatan bisnis masyarakat perkotaan. Akibatnya tentu relasi sosial masyarakat sangat bergantung dari relasi identitas masing-masing.

Dalam konteks ini, ada basis interaksi sosial yang lebih banyak melibatkan konteks dari basis latar belakang yang sama. Kondisi tersebut juga disebabkan oleh karakteristik perkampungan yang lebih dekat dengan wilayah perkotaan menyebabkan Beluluk relatif lebih banyak mengandalkan interaksi ekonomi dalam ruang sosial kewargaannya sehari-hari dibandingkan dengan konteks hubungan emosional yang terbangun di antara warga lokal.

Selain itu, terdapat juga pengelompokan warga yang lebih

didasari oleh basis identitas sosial keagamaan. Konteks ini menyebabkan kurang ‘cairnya’ relasi sosial kewargaan antar berbagai kelompok etnis, suku dan agama, baik mereka dari masyarakat asli sekitar, ataupun mereka para pendatang dari berbagai wilayah, baik dari Bangka maupun dari luar Bangka.

Jika ditinjau dari aspek partisipasi warga di di Beluluk, berdasarkan hasil wawancara, maka partisipasi masyarakat dalam konteks sosial politik kewargaan sehari-hari, maka masih terkesan kurang dan terbatas hanya pada hanya seremonial agama yang terkesan eksklusif. Konteks ini tentunya perlu diperkuat dan diperluas dalam cakupan partisipasi yang lebih luas dan lebih banyak melibatkan warga dari berbagai unsure etnis, suku dan agama agar terjalin hubungan emosional untuk saling bekerjasama sekaligus membangun semangat kolektivitas dalam berbagai arena sosial, politik, dan ekonomi warga sehari-hari. Sejauh ini, ada konteks partisipasi warga yang begitu pasif, khususnya mereka yang apatis dan jarang terlibat dalam berbagai aktivitas sosial yang menghendaki kehadiran semua warga desa. Selain itu, demografi sosial ekonomi warga di Beluluk juga ditengarai menjadi salah satu faktor rumitnya konteks partisipasi warga, khususnya dalam konteks informal.

SIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa dalam realitas lanskap ‘kampung-kota’ memperlihatkan bahwa terdapat fragmentasi dalam praktik kewargaan pada dua desa, khususnya untuk daerah Desa Beluluk dan Desa Kace Timur. Fragmentasi tersebut terdapat dalam ruang interaksi sosial dan praktik keagamaan warga sehari-hari, misalnya pada aspek religiusitas, tradisi lokalitas & kearifan budaya, namun menjadi mencair jika hubungannya dengan kepentingan politik

kolektif warga, misalnya dalam aspek perjuangan untuk mendapatkan akses dan menyuarakan aspirasi warga terkait wacana pemekaran ataupun perjuangan alih status menjadi warga Kota Pangkalpinang. Konteks fragmentasi yang dimaksud masih terbatas dan tidak sampai menjurus ke konflik yang berarti di antara warga.

Sementara itu, dalam konteks masyarakat Tuatunu, tidak ditemukan adanya fragmentasi. Hal tersebut juga didukung dengan semangat komunalitas warga yang terlihat dalam berbagai ruang dan interaksi sosial kewargaan, baik untuk kepentingan ekonomi, politik, dan tradisi budaya dan bidang keagamaan, nyaris terjalin interaksi yang begitu kuat. Selain itu, lanskap budaya lokal sangat tergambar dalam praktik kewargaan yang menjunjung nilai kerjasama, gotong royong, eksistensi nilai-nilai adat dan budaya lokal melayu yang masih telestari kuat hingga saat ini. Kondisi tersebut juga didukung dengan simbol-simbol kemelayuan yang tampak dalam arsitektur rumah adat dan rumah warga yang masih dengan mudah ditemukan di Tuatunu. Walaupun begitu, konteks Tuatunu memperlihatkan sisi berbeda yang mana semangat komunalitas kewargaan masih bertahan hingga saat ini, walaupun realitas dalam beberapa tahun terakhir terus di gerogoti oleh proyek modernisasi pembangunan dan perluasan komunitas warga kota, baik yang pendatang maupun para penduduk lokal di Bangka yang mulai mendiami perumahan-perumahan moderen.

Studi ini pada gilirannya juga menemukan bahwa masih adanya disparitas kemajuan dan perubahan konteks lanskap sosial-politik pada daerah pinggiran 'Kampung-Kota'. Disparitas tersebut menyebabkan semangat komunalitas warganya semakin tergerus sehingga menjadikan warganya semakin individualis dan kapitalis. Inilah kemudian yang disebut dalam artikel ini sebagai

'*market citizen*'. Sementara, di Kace Timur dan Beluluk, mulai terjadi konteks pergeseran makna dan praktis sosial budaya warga sehari-hari, akibatnya tentu modal sosial kewargaan menjadi lemah dan kian tergerus. Tuatunu memiliki konteks modal sosial yang masih kuat dibandingkan dua wilayah lainnya. Sementara, Kace Timur, ada modal sosial yang masih terawat, namun masih butuh intervensi berlanjut dari pihak pemerintah agar ada perubahan sosial yang lebih relevan untuk melestarikan nilai-nilai komunalitas dan solidaritas warga. Lebih lanjut, terdapat juga konteks kearifan lokal budaya yang menjadikan praktik kewargaan yang cukup efektif dalam mengelola tertib sosial dan tertib politik bersama. Potensi konflik pada tiga wilayah pinggiran pada dasarnya sama-sama terdapat potensi konflik. Namun perbedaannya yaitu pada derajat potensi konflik yang muncul, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pada masyarakat Tuatunu, konteks lokalitas menjadi salah satu ruang yang menjadikan kampung ini memiliki karakteristik komunalitas yang masih telestari dengan baik, selain itu konteks religiusitas masyarakat Tuatunu sangat terlihat dalam praktek sosial politik sehari-harinya, termasuk dalam proses pencarian atau pencapaian konsensus, aktivasi lembaga formal maupun informal di Tuatunu relatif berjalan dengan baik, terbukti dengan komunitas anak muda, termasuk juga para muda-mudi penggiat masjid yang begitu aktif dalam mendukung berbagai program yang berbasis pada agenda sosial keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.

Lebih dari pada itu, partisipasi politik masyarakat Tuatunu relatif tinggi, khususnya dalam konteks partisipasi politik formal, termasuk juga dalam konteks partisipasi masyarakat dalam ruang sosial politik sehari-hari, masih terdapat semangat komunalitas warga untuk saling memperhatikan dan

mempedulikan satu sama lain, selain itu juga masih kuatnya tradisi gotong royong. Sementara itu, pada konteks masyarakat Kace Timur, temuan sementara yaitu adanya pengelompokan warga dalam praktek keagamaan. Yang menarik justru konteks pengelompokan tersebut tidak berlaku ketika berkaitan dengan urusan pemerintahan desa atau kepentingan publik. Politik kewargaan dalam konteks Kace Timur relatif aktif. Persoalannya adalah selalu saja ada perbedaan persepsi terkait praktek keagamaan, misal satu sama lain justru memiliki beberapa praktek beribadat yang terkesan saling dipersoalkan satu sama lain.

Namun, hal tersebut tidak pernah berlanjut menjadi konflik serius antar warga. Selain itu, menjadi menarik kemudian untuk melihat partisipasi warga yang begitu kuat menjadi harapan tersendiri dalam mendorong penguatan kualitas demokratisasi dalam kehidupan masyarakat kampung yang sudah mulai terjamah dengan modernitas berkota. Tentu konteks kemoderenan selalu menghadirkan konsekuensi yang perlu perhatian serius untuk mengelola. Sama halnya dengan konteks mengelola konflik agar bisa menjadi bernilai bagi proses pendidikan kewargaan untuk saling menghormati, menghargai pendapat, toleran, dan saling mendukung dalam setiap upaya untuk memajukan kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiawan, O. (2006). Siasat Kaum Urban di Ranah Tradisi (Studi Kasus Komparasi Selamatan pada Warga Sosrokusuma dan Sari Mulyo. *Jurnal Balairung Edisi 076XX Edisi 10 Tahun XX*.
- Diamond, L. (2003). *Developing Democracy Toward Consolidation*. Yogyakarta: IRE Press Yogyakarta.
- Elvian, d. T. (2010). *Organisasi Sosial Suku Bangka Melayu di Tuatunu*. Pangkal Pinang: Dinas kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pangkal Pinang.
- Ibrahim. (2013). *Bangka Tengah dalam Harmoni Kata*. Bangka Tengah: BPMPD Kabupaten Bangka Tengah.
- Ibrahim, d. (2016). *Lobi Politik Berbasis Etnis dan Agama dalam Percaturan Politik Lokal di Kabupaten Belitung Timur*. Kerjasama antara BKKBN Provinsi, PSKK UBB dan PSKK UGM.
- Kriyantno, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahman, A. (2009). *Politik, Partisipasi, dan Demokrasi dalam Pembangunan*. Malang: Averroes Press.
- Rendy. (2017). Menuntaskan Konsensus Lokal-Nasional(yang Berkelanjutan: Membaca Ulang Rasionalisasi dan Idealisasi Pembangunan Model GBHN. *Journal Society 5 (1)*, 23-31.
- Santoso, P. (2013). Menjaga Martabat dalam Berdemokrasi. Draft Publikasi Paper Seminar Nasional.
- Sugiato, R. (2006). Menara Kota Menakar Peradaban (Narasi Atas Modernitas dan Pergulatan Hasrat Manusia. *Jurnal Balairung Edisi 076XX edisi 10 Tahun XX*.
- Profil Dea Beluluk Kabupaten Bangka Tengah 2017
- Profil Desa Kace Timur Kabupaten Bangka Induk 2017
- Profil Kelurahan Tuatunu Kota Pangkalpinang, 2017